

Mengapa Maluku Miskin: Diskursus Sebab-Akibat Kemiskinan dan Kemakmuran Suatu Daerah (Negara)

Madaskolay Viktoris Dahoklory¹, Alfian Reymon Makaruku², Eivandro Wattimury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

E-mail : dorisdahoklory@gmail.com, alfinreym234@gmail.com, ivandro.wattimury@gmail.com

Article History:

Received: 15 Juni 2025

Revised: 29 Juni 2025

Accepted: 30 Juni 2025

Keywords: Maluku, Sebab-Akibat, Kemiskinan

Abstrak: Maluku adalah salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan, ini adalah paradoks-maluku. Tentunya hal itu menjadi suatu diskursus bersama bagi masyarakat Maluku apakah kemiskinan Maluku diterpa oleh kutukan? Apakah kutukan mempunyai korelasi dengan faktor geografis, budaya, ataukah pemimpin yang demagogi? Tujuan penelitian ini memfokuskan pada penyebab utama kemiskinan di daerah Maluku. Hasil & pembahasan menyimpulkan kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin atau latarbelakang kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Intitusi ekonomi ekstraktif bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik kejenuhan yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif.

PENDAHULUAN

3M bukan merupakan akronim dari tiga miliar rupiah melainkan akronim dari sebuah pertanyaan filosofis untuk maluku hari ini; *Mengapa Maluku Miskin* (why mollucas povery)? Suatu kenyataan pahit yang harus diterima dengan lapang dada oleh masyarakat maluku bahwa sampai saat ini, Maluku masih tercatat sebagai salah satu daerah provinsi termiskin di Indonesia.

Menurut data BPS, provinsi Maluku menduduki peringkat ke-4 dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia dengan presentase penduduk miskin di Maluku adalah 16,42%.¹ Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan harus dipandang sebagai berkah. Sebab Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah, seperti perikanan tetapi dengan kekayaan sumber daya alam tersebut tidak dapat membawa Maluku keluar dari perangkap kemiskinan.

Ini adalah sebuah Paradoks-Maluku. Bagaimana mungkin Maluku yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam melimpah akan tetapi sebagian masyarakat hidup dalam kemiskinan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa seperti Belgia dan Italia yang daerah-daerah bagian (provinsi) memiliki sumber daya alam relatif lebih sedikit dan bergantung pada impor bahan-bahan baku mentah dari negara lain, akan tetapi masyarakat yang hidup di daerah bagian (provinsi) negara tersebut mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Bahkan negara seperti Belgia dan Italia tercatat sebagai negara maju. Padahal daerah-daerah bagian (provinsi) tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebaliknya, daerah Maluku yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti perikanan, pertanian, adapula sumber energi (minyak & gas) dan sumber mineral (logam & batuan maupun mineral bukan logam & batuan) justru terjerumus ke dalam liang kubur kemiskinan.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris (*sosiolegal*). dengan menggunakan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) yaitu berangkat dari teori, hipotesis, atau pendapat pakar dikaitkan dengan realitas permasalahan serta pendekatan kasus (*case approach*) yaitu berangkat dari kasus, kejadian faktual, atau realitas yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus diskursus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kutukan Sumber Daya Alam

Penelitian yang dilakukan Joseph E. Stiglitz, dkk dengan topik *escaping the resource curse* (2007)² menunjukkan bahwa negara-negara yang diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas cenderung diterpa kutukan, seperti performa pembangunan ekonomi yang buruk, dilandasi pertikaian (perang-saudara), korupsi, dan sebagainya. Gambaran itu terpampang jelas pada negara di benua Afrika seperti Kongo, Angola, dan Sudan yang digoncang dengan perang saudara sedangkan Nigeria menderita wabah korupsi. Dilain pihak negara-negara yang *minim* kekayaan sumber daya alam seperti Burkina Faso dan Ghana dapat hidup secara damai dan membangun pemerintahan yang demokratis.³ Pada titik ini, menjadi sebuah perenungan bersama bagi Bangsa Indonesia terkhususnya Maluku yang diberkahi kekayaan sumber daya alam namun berada dalam jalur kemiskinan, apakah Maluku juga dihantam dengan kutukan? Apakah kutukan sebagaimana dimaksud lahir dari faktor geografis, budaya, atautkah pemimpin yang demagogi? Atautkah terdapat faktor lain yang menyebabkan Maluku terus dan menerus masuk ke dalam perangkap kemiskinan (*poverty trap*)?

Hipotesis Geografis

Sejak Abad ke-18 filsuf Perancis Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya *The spirit of laws*, berangkat dari pendekatan fisiologis tubuh manusia yang terdiri dari dua bagian yaitu, padat

¹ www.badanpusatstatistik.co.id

² Joseph E. Stiglitz adalah seorang Ekonom dari Universitas Columbia yang meraih Nobel Ekonomi Dunia pada tahun 2001

³ Joseph E. Stiglitz, dkk (2007) *Escaping Resource Curse*. New York: Columbia University Press, hlm. 1-7

dan cairan. Urat dipandang sebagai unsur yang membangun semua bagian padat dari tulang rangka hingga pembuluh tubuh yang mengandung cairan. Dalam iklim yang dingin dapat mengerutkan urat-urat sistem jantung dan urat darah yang menyebabkan darah mengalir lebih cepat, dan menambah daya elastisitas, akibatnya urat semakin kuat. Itulah sebabnya mereka yang hidup dalam iklim dingin cenderung akan lebih mempunyai daya tahan dan giat bekerja (produktif). Sebaliknya mereka yang hidup dalam iklim panas (tropis) menyebabkan urat-urat mengendur dan memanjang, sehingga mengurangi daya kekuatan elastisitas. Akibatnya cenderung pemalas (tidak produktif), memilih tidur-beristirahat adalah sesuatu yang mengenakan ketimbang bekerja. Akibatnya mereka enggan bekerja keras menggunakan otaknya untuk belajar dan berinovasi dan itulah yang menyebabkan mereka miskin. Montesquieu juga berpandangan bahwa rakyat yang malas cenderung diperintah oleh penguasa yang despotik dan itu menunjukkan bahwa negeri-negeri beriklim tropis bukan hanya menjadi biang budaya malas (tidak produktif), tapi sekaligus menyebabkan keterpurukan ekonomi.⁴

Alasan geografis dalam versi modern berangkat dari dua pandangan yaitu, *Pertama* penyakit di daerah tropis terutama malaria berdampak buruk terhadap kesehatan dan produktifitas tenaga kerja. dan *Kedua* tanah di daerah tropis tidak cocok untuk bercocok tanam. Namun hipotesa geografis bahwa iklim panas pasti rakyatnya miskin dan melarat tidak sepenuhnya dapat diterima sebab terbantahkan dengan kemajuan negara-negara iklim tropis seperti singapura dan Botswana. Dengan demikian, sejarah dan pengalaman di daerah (negara) lain telah menunjukkan bahwa kondisi geografis (iklim panas) tidak sepenuhnya berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah.

Hipotesis Budaya

Sejak akhir abad ke-19, tokoh ekonom dan sosiolog terkenal asal Jerman, Max Webber (1864-1920) dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.⁵ Mengemukakan bahwa gerakan reformasi protestan dan etos kerja kaum Kristen Protestan yang menjunjung tinggi nilai kerja keras telah menciptakan kebangkitan industri modern. Tidak mengherankan negara-negara Protestan pertama seperti Inggris dan Belanda meraih kesuksesan awal pada zaman modern.

Meskipun etos kerja kaum Protestan telah menyebabkan industri modern yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap di Inggris sebagai agenda revolusi Industri pertama (1.0), dilain pihak telah membuka jalan kapitalisme. Singkatnya, budaya kapitalisme bertolak dari kebebasan individu sehingga individu atau swasta mempunyai hak menentukan sikapnya sendiri, terkhususnya dalam sistem perekonomian. Kapitalisme menghendaki pasar bebas (*free-market*) tanpa campur tangan Pemerintah. Sebab sistem ekonomi kapitalis hanya berorientasi pada *output* berupa nilai tukar (uang) ketimbang nilai guna (pakai) dari produksi suatu barang.⁶ Akibatnya Mekanisme pasar bebas justru menciptakan praktik monopoli swasta dan persaingan tidak sehat yang hanya mendatangkan keuntungan bagi segelintir pengusaha telah menciptakan jurang pemisah (*kesenjangan*) ditengah lapisan masyarakat antara yang *si* kaya dan *si* miskin.

Tidak dapat dihindari budaya kerja kapitalisme telah menyebar begitu cepat ke berbagai negara secara tersistematis, tidak terkecuali Indonesia. Sejak pra-kemerdekaan (zaman kolonialisme Belanda) masyarakat Indonesia dipaksa bekerja dengan sistem budaya kapitalisme.

⁴ Montesquieu. *The Spirit of Laws*, University of California 1997. (*Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*). Bandung: Nusamedia. 2007, hlm. 37-40

⁵ Max Webber. (1930). *The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism*. New Yor: Penguin

⁶ Franz Magins-Suseno. (2016). *Pemikiran Karl Marx (Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme)*. Jakarta: PT KOMPAS GRAMEDIA, cetakan kesepuluh. hlm. 168-174

Seperti sistem tanam paksa, mengharuskan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Maluku (Ambon) kala itu dipaksa untuk bercocok tanam. Masyarakat dipaksa bekerja memuluskan jalan kapitalisme, hasil produksi tanaman maupun hasil kekayaan sumber daya alam lainnya dijera dan dipergunakan bagi kepentingan segelintir orang (kapitalis).

Bahkan sesudah Indonesia Merdeka hingga saat ini, budaya kapitalisme mengalami transformasi dan evolusi dengan institusi politik Indonesia. Tidak mengherankan jika Indonesia dan daerah-daerah provinsi di dalamnya mengalami kesenjangan ekonomi. *Gini Ratio* pada tahun 2024 sebesar 0,38%. Artinya hampir 1% dari 280 juta jiwa masyarakat menguasai kekayaan Indonesia sedangkan sisanya 62% kekayaan dibagi untuk 99% masyarakat Indonesia. Dengan bahasa lain, kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak dikelola dan dipergunakan secara merata untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir atau beberapa orang tertentu. Barangkali itulah yang terjadi pada masyarakat Maluku sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini.

Kendati demikian, budaya kapitalisme tidak sepenuhnya menjadi alasan pembenar bagi kemiskinan maluku hari ini. Sebab hipotesa demikian, juga terbantahkan dengan budaya etos kerja *konfusiusme* yang dipraktikkan di Tiongkok (Cina) dengan membuka jalan budaya sosialisme (komunisme) terbukti dapat mengangkat Tiongkok keluar dari perangkap kemiskinan. Dilain pihak, budaya kerja Indonesia tidak mencirikan sistem kapitalis maupun sistem sosialis. Bangsa Indonesia justru memilih jalan perekonomian nasional sendiri yang termaktub secara *ekplisit* dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang menyatakan “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” dan ayat (3) berbunyi “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.⁷ Bertolak dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut, sesungguhnya menunjukkan bahwa sistem perekonomian nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Hipotesis Pemimpin Demagogi

Teori terakhir yang dapat menjelaskan kesenjangan antara daerah-daerah yang kaya dan miskin adalah hipotesis kebodohan (demagogi), yang mengungkapkan kemiskinan suatu daerah disebabkan karena para pengambil kebijakan yang terpilih dan berkuasa tidak tahu cara mensejahterakan rakyat yang telah memilihnya. Ilmuwan politik dari Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya *How to Democratie Die* (2018)⁸ melalui analisis panjang di sejumlah negara demokrasi, menjelaskan secara sederhana penyebab demokrasi mati di suatu negara, adalah disebabkan oleh sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya sistem demokrasi menyediakan pranata sub-sistem demokrasi seperti pemilu. Tanpa disadari dalam model pemilu langsung seorang yang demagogi berpotensi terpilih dan berkuasa. Pada saat yang bersamaan seorang pemimpin demagogi dengan mudah berevolusi menjadi seorang otoriter yang pada gilirannya dapat membunuh sistem demokrasi itu sendiri. Misalnya sistem demokrasi mencirikan adanya pihak oposisi dan kebebasan berpendapat (Media/Pers) serta perlindungan

⁷ Ketika terjadi Amandemen Konstitusi 1999-2002, Pasal 33 UUD 1945 menjadi salah satu yang memunculkan perdebatan di kalangan ekonom, Misalnya ekonom Junior seperti Sri Mulyani, dkk menghendaki agar pasal tersebut diiadakan. Sebaliknya ekonom senior yang dipimpin oleh Mubiarto, dkk menghendaki agar pasal tersebut tetap ada. Alhasil terjadi kompromi di kalangan ekonom dengan merumuskan dan menambahkan satu ayat baru menjadi pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jimly Asshiddiqie. (2010) *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta, Kompas

⁸ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt (2018). *How to Democratie Die* (Bagaimana Demokrasi Mati). Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 152

hak-hak properti (hak milik atas tanah) tapi dengan hadirnya pemimpin demagogi (otoriter) maka kebijakan yang diambil dapat meniadakan ciri-ciri tersebut.

Terciptanya kondisi masyarakat yang melarat dan miskin bukan karena hadirnya pemimpin demagogi atau staff ahli yang tidak cakap dan pandai dalam membuat kebijakan politik yang populis. Problemnya justru terletak pada institusi politik yang ekstraktif. Sistem pemilu nasional (*pilpres*) maupun pemilu lokal (*pilgub, pilbup & pilwal*) dibangun dengan sistem politik kartel. Artinya setiap kandidat tidak dapat mencalonkan dirinya sendiri tanpa melalui kendaraan partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga tidak dapat dinafikan calon yang di usung, entah berasal dari kalangan demagogi maupun pedagogi (pandai) sekalipun, ketika terpilih dan berkuasa akan lebih cenderung mengambil kebijakan yang melayani kepentingan pengusung ketimbang rakyat selaku pemilih. Jadi singkatnya seorang yang cakap dan pandai (pedagogi) ketika terpilih dan berkuasa dalam institusi politik yang ekstratif tidak menjamin dapat mengambil kebijakan yang melayani kepentingan masyarakat.

Institusi Politik-Ekonomi Ekstraktif

Kemiskinan di suatu daerah (negara) tidak selalu berkorelasi dengan ketidakcakapan dan kebodohan pemimpin ataupun dilatarbelakangi kebudayaan. Korelasi kemiskinan di suatu daerah tertentu lebih bersinergi dengan institusi politik-ekonomi yang ekstraktif. Daron acemoglu & James Robinson⁹ dalam penelitian yang berjudul *why nation fail* (2012)¹⁰ mengemukakan, Intitusi ekonomi ekstraktif bisa dipastikan akan bersinergi dengan institusi politik ekstraktif yang memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elite politik, yang cenderung mempertahankan dan membangun institusi ekonomi ekstraktif demi keuntungan mereka sendiri, serta memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki demi mempertahankan kekuasaan politik. Relasi antara institusi ekonomi ekstraktif dengan institusi politik ekstraktif akan menimbulkan sebuah lingkaran setan (*devil-circle*) yang melestarikan hegemoni institusi ekstraktif.

Jika terjadi konflik antara institusi politik ekstraktif dan institusi ekonomi ekstraktif, maka dapat dipastikan pemenangnya ditentukan oleh kekuatan politik di dalam masyarakat. Tidak mengheran bila akan terjalinnya koalisi antar institusi politik-ekonomi untuk melestarikan hegemoni kekuasaan intitusi ekstraktif. Bukan sebuah rahasia umum lagi, menemukan adanya institusi ekonomi (pengusaha-swasta) bergelut dengan institusi politik (politisi/pemegang kekuasaan) untuk membentuk kekuatan politik-ekonomi ekstraktif, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebaliknya institusi politik (politisi/pemegang kekuasaan) bergelut dalam institusi ekonomi (swasta-pengusaha) untuk melestarikan hegemoni kekuasaan politik-ekonomi ekstraktif.

Sebuah daerah (negara) yang memiliki potensi sumber daya alam relatif melimpah bilamana dikelola oleh institusi politik-ekonomi ekstraktif, hasil akhirnya sudah dapat ditebak. Pemanfaatan sumber daya alam tidak diperuntukan bagi kemakmuran rakyat setempat melainkan hanya dirasakan oleh segelintir atau beberapa kelompok. Meskipun daerah Maluku dikenal sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut relatif melimpah, tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita atau produk domestik regional bruto (PDRB) relatif lebih rendah dibanding dengan daerah lainnya. Barangkali penyebab utamanya dikarenakan kebijakan institusi politik-ekonomi ekstraktif lebih cenderung bersifat sentralisasi politik.

⁹ Daron Acemoglu & James A. Robinson adalah pakar ekonom dan politik yang meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2024

¹⁰ Daron Acemoglu & James A. Robinson. (2012). *Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity, and Poverly*. New York: Published by Crown Business, hlm. 500-501

Dengan kekayaan sumber daya laut relatif melimpah, dalam wilayah laut Maluku ditetapkan sebanyak tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yaitu: (i) WPP 714 laut banda, (ii) WPP 714 laut seram, dan (iii) WPP 718 laut arafura dan laut timor. Kekayaan sumber daya laut Maluku telah memberikan kontribusi tertinggi dibanding daerah lain, dengan presentase 26% hingga 37% untuk negara per/tahun. Namun proyek strategis nasional yang mencanangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan pembangunan Ambon New Port sejak tahun 2016, tidak kunjung direalisasikan. Kendati dalam rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022, Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri mengatakan secara terang-terangan bahwa *‘duitnya nggak ada’* dan *harus mengundang investor*.¹¹ Pernyataan itu menggambarkan betapa lemahnya negara jika berhadapan dengan institusi ekonomi ekstraktif, sehingga *lagi dan lagi* harus mengundang kerjasama politik-ekonomi. Jika kerjasama dimaksud berhasil dilakukan tanpa partisipasi politik rakyat maluku, maka hasil akhir yang dicapai pun tidak akan jauh berbeda dengan *status quo*. Selain itu, kebijakan politik menetapkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan dalam menetapkan Transfer kas Daerah (TKD). Terdapat enam jenis TKD, yaitu DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Khusus alokasi DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan: (a) kebutuhan pelayanan publik, (b) kemampuan keuangan negara, (c) pagu TKD secara keseluruhan, dan (d) target pembangunan nasional.¹² Tidak disebutkan dengan “mempertimbangkan karakteristik daerah” seperti wilayah kepulauan.

Daerah maluku juga mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam energi seperti minyak & gas yang berada di daerah Masela (wilayah administratif Maluku Barat Daya), dan telah dibangun Kilang Blok Masela (tempat penampungan minyak & gas) yang ditarget mulai beroperasi pada tahun 2029 namun diramalkan mundur pada tahun 2032.¹³ Permasalahannya institusi ekonomi yang terlibat berasal dari perusahaan asing (INPEX Corporate Jepang) selaku investor. Daerah manapun termasuk Maluku tidak dapat menghindari atau anti terhadap investasi, sebaliknya investasi merupakan bagian dari pranata pertumbuhan ekonomi yang tak terelakkan. Tentunya investasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi di suatu negara (daerah). Namun bagaimana jika investasi Blok Masela diperhadapkan dengan institusi politik-ekonomi ekstraktif. Sulit membayangkan Maluku akan keluar dari perangkap kemiskinan. Adapula kekayaan alam dari sektor pertambangan emas yang terletak di gunung botak pulau Buru, bertahun-tahun dirampok oleh institusi ekonomi ekstraktif (penguasa/pemodal) yang tidak bertanggung jawab, melakukan aksi penambangan emas tanpa izin.¹⁴ Di pulau Seram, kabupaten Seram Bagian Barat terdapat aktifitas pertambangan nikel. Operasi pertambangan nikel yang dilakukan hampir dapat dipastikan mengikuti pola sama, yakni adanya korelasi antara institusi politik ekstraktif (politisi) dan institusi ekonomi ekstraktif (pengusaha/swasta). Menurut Acemoglu & Robinson, tidak berarti institusi politik-ekonomi ekstraktif gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya semua kelompok elite politik akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, agar mereka bisa merampok lebih banyak. Namun perlu digarisbawahi pertumbuhan ekonomi dalam institusi politik-ekonomi ekstraktif sulit dipertahankan karena dua alasan, yaitu: *Pertama*, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi diperlukan inovasi, sementara dalam

¹¹ IDN Times, Anggota Komisi IV DPR Protes Menteri Kelautan & Perikanan, 24 Maret 2022

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹³ CNBC Indonesia. Inpex Ramal Operasi Blok Masela Mundur Lagi ke 2032. Rabu, 30 Agustus 2023

¹⁴ ANTARA NEWS. Polda Maluku Amankan Emas 628,31 gram dari penambang ilegal. 31 Oktober 2024

intituti politik-ekonomi ekstraktif menolak inovasi karena dapat mengancam kenyamanan kekuasaan politik-ekonomi ekstraktif. *Kedua*, kebijakan politik-ekonomi ekstraktif cenderung mengorbankan sebagian besar rakyat, akibatnya terdapat kesenjangan ekonomi dan memicu pertikaian atau perang saudara. Cukup relevan seperti yang terjadi di pulau Buru, akibat penambangan emas ilegal memicu korban yang ditemukan tewas.

KESIMPULAN

Meskipun institusi politik-ekonomi ekstraktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak akan bertahan lama. Sebab institusi politik-ekonomi ekstraktif akan tiba pada titik jenuh. Pada titik kejenuhan tersebut, akan hadir momentum emas (*golden moment*) yang ditandai dengan kejadian luar biasa, seperti wabah penyakit, perang saudara, demonstrasi masa, dan lain sebagainya, yang memicu transformasi dan evolusi intistusi politik-ekonomi ekstraktif menjadi institusi politik-ekonomi inklusif. Keberadaan institusi politik-ekonomi inklusif akan bersinergi dengan kemakmuran suatu negara (daerah). Korelasi positif antara intituti politik-ekonomi inklusif dengan kemakmuran suatu negara (daerah) dikarenakan institusi politik-ekonomi inklusif melindungi hak kekayaan rakyat, menciptakan arena kompetisi yang adil ketimbang institusi politik-ekonomi ekstraktif yang dibangun untuk menguras keringat rakyat dan kekayaan alam di sekitarnya. Institusi politik-ekonomi membagi kekuasaan politik dan ekonomi dengan merata secara pluralistik dan desentralistik. Institusi politik-ekonomi inklusif menghadirkan partisipasi rakyat secara transparan dan akuntabel sehingga setiap kebijakan politik-ekonomi lebih bersifat responsif-populistik. Dalam institusi politik-ekonomi inklusif, terdapat pemisahan tegas antara urusan bisnis (intituti ekonomi) dan urusan politik (institusi politik) dan tidak boleh dicampur-aduk. Sistem institusi politik-ekonomi harus dirancang dengan mekanisme hukum ketatanegaraan yang efektif dan efisien. Instrumen hukum mesti mampu merekayasa pembatasan kerja (kekuasaan) antara institusi politik dan institusi ekonomi. Misalnya rekayasa UU larangan konflik kepentingan (*conflict of interest*) untuk mencegah benturan kepentingan bisnis dan politik. UU tersebut harus di desain secara independen dan transparan serta melibatkan partisipasi rakyat, dengan tujuan utamanya membatasi ruang gerak pelaku ekonomi dalam institusi politik, sehingga institusi politik tidak dijadikan kendaraan untuk memuluskan tujuan bisnis-berbisnis. Sebaliknya institusi politik tidak memberdayakan pelaku ekonomi (institusi ekonomi) untuk melegitimasi kekuasaan politik.

REFERENSI

- Daron Acemoglu & James A. Robinson. (2012). *Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity, and Poverly*. New York: Published by Crown Business
- Franz Magins-Suseno. (2016). *Pemikiran Karl Marx (Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme)*. Jakarta: PT KOMPAS GRAMEDIA, cetakan kesepuluh.
- Joseph E. Stiglitz, dkk (2007) *Escaping Resource Curse*. New York: Columbia University Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2010) *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta, Kompas.
- Max Webber. (1930). *The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism*. New Yor: Penguin.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*, University of California 1997. (*Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*). Bandung: Nusamedia. 2007.
- Steven Levitsky & Daniel Ziblatt (2018). *How to Democratie Die* (Bagaimana Demokrasi Mati). Jakarta: Kompas Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ANTARA NEWS. Polda Maluku Amankan Emas 628,31 gram dari penambang ilegal. 31

Oktober 2024

CNBC Indonesia. Inpex Ramal Operasi Blok Masela Mundur Lagi ke 2032. Rabu, 30 Agustus 2023

IDN Times, Anggota Komisi IV DPR Protes Menteri Kelautan & Perikanan, 24 Maret 2022

www.badanpusatstatistik.co.id